

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program jaminan sosial pada suatu negara yaitu wujud amanah dan tugas negara guna memberi perlindungan sosial ekonomi pada masyarakatnya (Syachrezi, 2023). Pada UUD tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 mengenai Sistem Jaminan Sosial yang mengatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Undang-undang ini diperuntukkan bagi semua penduduk di Indonesia tanpa adanya lapisan yang membedakan, sesuai dengan kebutuhan minimal untuk mendapatkan hidup yang baik dan layak (Fath-Hiah & Nafi’ah, 2023).

Negara dengan populasi terbesar di dunia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah data sensus penduduk dari BPS Indonesia pada Februari tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 281.603,8 jiwa, negara Indonesia merupakan negara menempati peringkat keempat dengan total penduduk terbanyak di dunia, ini mengalami peningkatan 23,2 juta jiwa dari sensus penduduk yang dilakukan selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2014 hingga tahun 2024 (BPS Indonesia, 2024). Karena dinamika kehidupan yang ada di masyarakat akan semakin kompleks dan kemungkinan masalah sosial akan meningkat, perlu adanya jaminan sosial yang dapat melindungi masyarakat, termasuk masyarakat yang sudah bekerja untuk melindungi dirinya dan keluarganya (Rosanjaya & Nafi’ah, 2023).

Pemerintah melaksanakan UUD Tahun 1945 dengan menciptakan UU No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 (UU No.24/2011) mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang tersebut bertujuan guna menyediakan jaminan sosial bagi setiap penduduk di Indonesia, berguna agar pemenuhan minimal hidup yang baik dan layak untuk

tercapainya penduduk Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur (Afifah & Paruntu, 2015).

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari tahun 2024, mengenai jumlah tenaga kerja di Indonesia berjumlah 149,38 juta orang, bertambah 2,76 juta orang dibanding pada bulan Februari tahun 2023. Tenaga kerja informal pada periode yang sama mencapai 84,13 juta orang atau setara 59,17% dari total, ini mengalami penurunan dibanding pada bulan Februari tahun 2023 yang mencapai 60,12%. Selanjutnya, tenaga kerja formal yang tercatat bahwa terdapat 58,05 juta orang atau 40,83% dari total tenaga kerja, ini mengalami peningkatan sebesar 0,95% dibanding pada bulan Februari tahun 2023 (BPS Indonesia, 2024).

Data BPJS Ketenagakerjaan yang dianalisis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperlihatkan jumlah tenaga kerja aktif pada tahun 2023 alami pertumbuhan yakni 15,89% *Year On Year* (YoY), mencapai 41,46 juta peserta aktif. Angka ini memperlihatkan penambahan sekitar 5,60 juta peserta aktif dibanding tahun 2022 yakni 35,86 juta (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Dari total itu, sekitar 25 juta peserta aktif ialah pekerja PU, 9,19 juta ialah pekerja BPU, dan 7,36 juta lainnya ialah pekerja dalam sektor jasa konstruksi. Dari jenis kelamin, ada 28,98 juta pekerja laki-laki terdata aktif pada BPJS Ketenagakerjaan, lalu total pekerja perempuan capai 12,57 juta, memperlihatkan ketimpangan yang signifikan (Santika, 2024).

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sampai Desember tahun 2023, ada 61,08 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan. Data BPS mengatakan, jumlah penduduk bekerja per-Agustus tahun 2023 ialah 139,85 juta, sehingga jumlah pekerja belum terdaftar kedalam peserta BPJS Ketenagakerjaan ialah 78,77 juta. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, ada 9.192.755 peserta BPU sampai tahun 2023, meningkat dari 6.004.021 peserta pada tahun 2022. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per-Agustus tahun 2023, jumlah ini hanya 11% dari 82,67 juta pekerja informal. Selain

itu, peserta program JHT masih rendah, sebesar 6,88% dari total peserta BPU. Selain itu, peserta program JKK dan JKM mencapai 9,1 juta pada tahun 2022.

Di Provinsi Jawa Barat sampai sekarang baru 75% tenaga formal jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya untuk tenaga kerja *non formal* hanya 25%. Dari 22,31 juta pekeria di Jawa Barat, baru 26% yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Terdapat 12 juta lebih tenaga kerja di Jawa Barat belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Di Jawa Barat 31% yang sudah terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah pekerja di Jawa Barat sekitar 18 juta. Terdapat 12,6 juta lagi yang belum di cover atau yang belum mendaftarkan diri untuk mengikuti program jaminan sosial pada BPIS Ketenagakerjaan (Portal JabarProvGoID, 2023).

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat sekitar 14,8 juta penduduk yang berpotensi menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Hingga pada bulan Desember tahun 2023, terdapat 5,07 juta orang atau sekitar 31,7% dari jumlah itu sudah terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dari persentase 31,7% itu, sekitar 3,3 juta orang ialah tenaga kerja PU, 1,03 juta orang ialah tenaga kerja BPU, dan sekitar 737,8 ribu orang ialah tenaga kerja dalam sektor konstruksi. Meskipun demikian, tingkat cakupan *Universal Coverage* untuk perlindungan jaminan sosial untuk yang bekerja di Jawa Timur masih tergolong cukup rendah (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2024).

Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta ialah provinsi dengan jumlah pekerja aktif yang terbanyak dalam mengikuti program jaminan sosial untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mencapai 7,49 juta orang. Dari jumlah keseluruhan ini yaitu 5,46 juta pekerja PU, 1,26 juta pekerja BPU, dan 771 ribu pekerja di sektor jasa konstruksi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat peserta yang nonaktif ada 19,51 juta pekerja dalam jangka waktu serupa. Rinciannya, pekerja PU yang mempunyai jaminan ketenagakerjaan nonaktif mencapai 18,53 juta orang, sedangkan pekerja BPU berjumlah 979 ribu orang (Santika, 2024).

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta selatan merupakan kantor cabang yang memberikan layanan terkait program jaminan sosial untuk para pekerja di wilayah Cilandak Jakarta Selatan. Adapun wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan yaitu Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pesanggrahan, dan Kecamatan Cilandak, dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai ojek *online*, pedagang, baik pedagang kaki lima, pedagang usaha kecil, maupun pedagang usaha menengah, ini merupakan termasuk kedalam pekerja BPU.

Data yang sudah didapatkan oleh Peneliti dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan yaitu data pada tahun 2023 terkait jumlah pekerja PU terdapat 378.257 dan pekerja BPU terdapat 64.531. Sedangkan data terkait jumlah pekerja yang sudah mengikuti program jaminan sosial pada peserta PU terdapat 137.878 dan peserta BPU terdapat 72.924 pada wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan.

Data terakhir yang didapatkan oleh Peneliti pada saat studi pendahuluan kepada pihak Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan yaitu data pada hari Kamis, 26 Juni tahun 2024 ditemukan bahwa jumlah pekerja PU terdapat 375.015 dan pekerja BPU terdapat 71.108. Sedangkan data terkait jumlah pekerja yang sudah mengikuti program jaminan sosial pada peserta PU terdapat 62.502 dan peserta BPU terdapat 50.468 pada wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan.

Salah satu masalah yang ditemui dalam penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ialah penurunan jumlah peserta pekerja BPU dari tahun 2023 sampai Juni 2024, mencapai 22.456 peserta. Selain itu, kesadaran akan pentingnya program jaminan sosial ini masih rendah di kalangan pekerja BPU. Meski begitu, semua pekerja, baik bekerja formal dan informal, mempunyai hak yang sama guna menerima manfaat dari program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Ini memperlihatkan komitmen

pemerintah guna menjamin semua lapisan masyarakat mendapat hak dan layanan yang adil dan merata.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, menurunnya jumlah kepesertaan bagi pekerja BPU pada tahun 2023 hingga bulan Juni tahun 2024 pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan. Terdapat juga pekerja BPU masih belum mengikuti program jaminan sosial yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan *awareness* (kesadaran) pekerja BPU terkait pentingnya program jaminan sosial di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan yang masih rendah, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sosialisasi pihak Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan kepada pekerja BPU.

Data terakhir yang didapatkan oleh Peneliti pada saat studi pendahuluan kepada pihak Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan yaitu data pada hari Kamis, 26 Juni tahun 2024 ditemukan bahwa jumlah pekerja PU sejumlah 375.015 dan pekerja BPU sebanyak 71.108. Sedangkan data terkait jumlah pekerja yang sudah mengikuti program jaminan sosial pada peserta PU sejumlah 62.502 dan peserta BPU sejumlah 50.468 pada wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan.

Pada kepesertaan ini salah satu kendala yang ditemukan dalam berjalannya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan adalah menurunnya angka kepesertaan untuk pekerja BPU dari tahun 2023 hingga bulan Juni tahun 2024 sebanyak 22.456 peserta pada pekerja BPU dan juga masih rendahnya *awareness* (kesadaran) bagi pekerja BPU akan pentingnya program jaminan sosial.

Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian terkait “Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat *Awareness* (Kesadaran) Pentingnya

Jaminan Sosial Bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan Tahun 2024”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana faktor – faktor yang berhubungan dengan tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan tahun 2024?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan tahun 2024.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan tahun 2024.
2. Mengetahui distribusi frekuensi kesadaran emosi, faktor predisposisi, dan faktor penguat.
3. Mengetahui hubungan antara kesadaran emosi dengan tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan tahun 2024.
4. Mengetahui hubungan antara faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, pekerjaan, dan status ekonomi dengan tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan tahun 2024.

5. Mengetahui hubungan antara faktor penguat meliputi keluarga dan peraturan dengan tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan tahun 2024.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan

Mendapatkan gambaran dan masukan tambahan mengenai meningkatkan *brand awareness* (kesadaran) bagi pekerja BPU akan pentingnya program jaminan sosial pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan agar dimanfaatkan oleh pekerja BPU yang belum terdaftar agar menjadi peserta program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

1.5.2. Bagi Universitas MH. Thamrin

Mendapatkan gambaran dan masukan tambahan mengenai meningkatkan *brand awareness* (kesadaran) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan yang dapat dimanfaatkan oleh instansi Universitas MH. Thamrin dalam mendaftarkan karyawan atau tenaga kerja Universitas MH. Thamrin yang belum terdaftar agar menjadi peserta jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Menambahkan mata kuliah terkait BPJS Ketenagakerjaan di Universitas MH. Thamrin, agar mahasiswa/i lebih utama untuk *aware* terhadap jaminan sosial yang ada di Indonesia, terkhusus program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

1.5.3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai meningkatkan *brand awareness* (kesadaran) pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan terkait tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU.

1.5.4. Bagi Masyarakat Umum

1. Mengembangkan ilmu *brand awareness* (kesadaran) BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja BPU agar menjadi peserta jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Memberikan rujukan bacaan tentang tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan.

1.6. Ruang Lingkup

Penelitian ini memaparkan tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan tingkat *awareness* (kesadaran) pentingnya jaminan sosial bagi pekerja BPU di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Jakarta Selatan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2024. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan cara menyebarkan kusioner melalui *Google Formulir* kepada pekerja BPU, yang hasilnya kemudian akan dianalisis secara univariat dan bivariat melalui aplikasi *software SPSS versi 25*. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pekerja BPU yang belum terdaftar atau belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan sampel diambil secara acak dari populasi dengan menggunakan Rumus Slovin, adapun sampel sebanyak 100 pekerja BPU.